

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Tugas Pokok : Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
 d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat .

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Baseline (2021) | Formulasi Perhitungan/ Penjelasan | Sumber Data |
|-----|---|---|-----------------|--|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas LPPD | Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel | 100% | (Jumlah IKK yang valid : Jumlah IKK Keseluruhan) x 100% | Permendagri |
| 2 | Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi | Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi | 100% | (Jumlah Warga Negara yang berhak menerima pelayanan dasar yang terlayani : Jumlah Warga Negara Yang Berhak Menerima pelayanan dasar yang harus dilayani) x 100% | Permendagri |
| 3 | Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah | Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah | 100% | (Jumlah usulan yang difasilitasi : Jumlah usulan yang masuk) x 100% | Biro Pem dan Otda (Bagian Kerjasama) |
| 4 | Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat | Persentase tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilaksanakan | Belum diukur | (Jumlah indikator tugas GWPP yang dilaksanakan : Jumlah tugas GWPP sesuai Permendagri) x 100% | Biro Pem dan Otda (Bagian Otonomi Daerah) |

| | | | | | |
|---|---|---|-----|--|---|
| 5 | Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah | 1. Persentase Kabupaten/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya. | 75% | (Jumlah Segmen Batas Yang Diusulkan Permendagrinya : Jumlah Segmen batas Keseluruhan) x 100% | Biro Pem dan Otda (Bagian Pemerintahan) |
| | | 2. Persentase usulan Nagari/desa/ Kelurahan yang difilitasi penataan kewilayahannya | 85% | Jumlah Usulan Yang Difasilitasi : Jumlah Usulan Yang Masuk x 100% | Biro Pem dan Otda (Bagian Pemerintahan) |

Kepala Biro Pemerintahan
Dan Otonomi Daerah



DONI RAHMAT SAMULO, S.STP, M.Si
NIP.19760618 199511 1 001